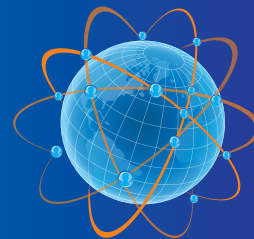


# SOSIOGLOBAL

Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi



- Model Pembangunan Sosial : Pengentasan Kemiskinan Berazas Spiritual 1-13
- Eksplorasi Pasir Besi dan Dampak Lingkungan Sosial, Budaya, Ekonomi Pada Masyarakat di Pesisir Pantai Selatan Jawa Barat 14-32
- Pengembangan Wisata Kopi Berbasis Masyarakat di Desa Warjabakti Kabupaten Bandung 33-48
- Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia 49-67
- Model Pengembangan Desa Wisata (Studi Komparatif Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang dan Desa Sarongge, Kecamatan Pacet) 68-81
- Melampaui Postmodernisme: Kajian Teoritis Terhadap Pemikiran Robert Samuels Tentang *Automodernity* 82-100

Diterbitkan oleh :

**Departemen Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Padjadjaran**

Jl. Raya Bandung-Sumedang, Km. 21, Sumedang 45363  
Telp. (022) 7796416/7798418 Ext. 142-FAX (022) 7796974  
e-mail : jurnal.sosioglobal@gmail.com

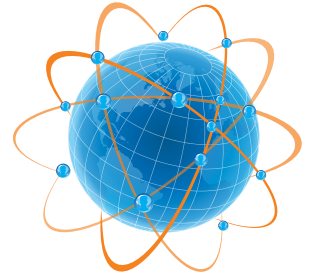
ISSN 2548-4559



9 772548 455000

# SOSIOGLOBAL

## Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi



---

Volume I Nomor I Desember 2016

---

SOSIOGLOBAL adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Jurnal SOSIOGLOBAL mempublikasikan hasil pemikiran serta penelitian di bidang Sosiologi. Terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Desember dan Juni

- Penanggung Jawab : Kepala Departemen Sosiologi
- Pimpinan Redaksi : M.Fadhil Nurdin, MA., Ph.D
- Wakil Pimpinan Redaksi : Dr. Drs. Wahyu Gunawan, M.Si  
Budi Sutrisno, S.Sos.,M.Si
- Dewan Redaksi : Dr. Bintarsih Sekarningrum, M.Si  
R.A Tachya Muhamad, M.Si  
Yusar, S.Sos., M.Si  
Desi Yunita, S.Sos.,M.Si
- Mitra Bestari : Prof. Azlinda Azman, Ph.D, USM, Malaysia  
Bala Raju Nikku, Ph.D, Purbanchal University, Nepal  
Huda Abdulaziz ,Ph.D, Princess Nourah bin Abdul Rahman  
University, Saudi Arabia  
Dr. Ary Bainus, M.A., Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat Redaksi :

Kampus FISIP Unpad Gd. CLt.1  
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21  
Telp/Fax : (022) 7796416/7798418 Ext. 142 - Fax (022) 7796974  
Email : [jurnal.sosioglobal@gmail.com](mailto:jurnal.sosioglobal@gmail.com)  
Website : <http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal>  
Percetakan : Unpad Press  
Pertama Terbit : Desember 2016  
Frekwensi Terbit : Dua kali setahun, setiap bulan Desember dan Juni

## PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Sosioglobal diterbitkan oleh Pusat Studi Kemasyarakatan dan Pembangunan (*Centre for Social and Development Studies*) Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran. Jurnal ini secara normal terbit dua kali setahun dan menerbitkan edisi khusus (*special issues*) sekali setahun dengan menerima tulisan dari pelbagai kalangan ilmuwan, akademisi maupun praktisi bidang sosial dan politik dari seluruh Indonesia maupun Malaysia.

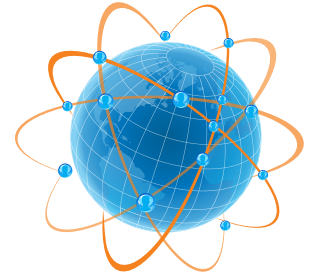
Dalam jurnal edisi pertama ini menampilkan 6 makalah berbahasa Indonesia; dan sebuah tulisan berbahasa Malaysia. Model Pembangunan Sosial: Pengentasan Kemiskinan Berazas Spiritual, Model Pengembangan Desa Wisata (Studi Komparatif Desa Jayagiri Kecamatan Lembang dan Desa Sarongge Kecamatan Pacet, Eksploitasi Pasir Besi dan Dampak Lingkungan Sosial Budaya, Ekonomi pada Masyarakat di Pesisir Pantai Selatan Jawa Barat, Pengembangan Wisata Kopi Berbasis Masyarakat Di Desa Warjabakti Kabupaten Bandung, Peran Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. Selain itu, terdapat makalah kajian teoritis, yaitu: Melampaui Postmodernism: Kajian Teoritis terhadap Pemikiran Robert Samuels tentang *Automodernity*, dan tulisan terakhir, Model dan Fungsi Kesejahteraan Sosial-berdasarkan kolaborasi Departemen Sosiologi Fisip Unpad dengan School of Social Sciences Universiti Sains Malaysia.

Makalah-makalah tersebut telah melalui proses penilaian sewajarnya sesuai kaidah dan prosedur ilmiah di dunia akademik.

Bandung, Januari 2017

Ketua Dewan Penyunting

Muhamad Fadhil Nurdin, MA., Ph.D



## DAFTAR ISI

	Hal
Pengantar Redaksi	
Model Pembangunan Sosial : Pengentasan Kemiskinan Berazas Spiritual M. Fadhil Nurdin.....	1-13
Eksplorasi Pasir Besi dan Dampak Lingkungan Sosial, Budaya, Ekonomi Pada Masyarakat di Pesisir Pantai Selatan Jawa Barat Desi Yunita, Risdiana, Wahyu Gunawan, Caroline Paskarina, Budi Sutrisno.....	14-32
Pengembangan Wisata Kopi Berbasis Masyarakat di Desa Warjabakti Kabupaten Bandung Wahju Gunawan, Desi Yunita, Saifullah Zakaria.....	33-48
Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia Ari Ganjar Herdiansah, Randi .....	49-67
Model Pengembangan Desa Wisata (Studi Komparatif Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang dan Desa Sarongge, Kecamatan Pacet) Budi Sutrisno, R.A Tachya Muhamad.....	68-81
Melampaui Postmodernisme : Kajian Teoritis Terhadap Pemikiran Robert Samuels Tentang <i>Automodernity</i> I Gusti Made Arya Suta Wirawan .....	82-100

# **MODEL PEMBANGUNAN SOSIAL: PENGENTASAN KEMISKINAN BERAZAS SPIRITUAL**

**M. Fadhil Nurdin**  
Universitas Padjadjaran  
m.fadhil.nurdin@unpad.ac.id

## **ABSTRAK**

Artikel ini merupakan model pembangunan sosial untuk pengentasan kemiskinan berazas spiritual. Pembangunan sosial memerlukan pemikiran yang selaras antara konsepsi dengan prakteknya. Kegiatan pembangunan sosial merupakan usaha yang tiada henti, selama masalah kehidupan manusia masih ada dan memerlukan penyelesaiannya. Fokus untuk membangun manusia dengan tujuan memungkinkan rakyat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan sejahtera. Diharapkan model ini konstruktif bagi Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Penulisan artikel ini didasarkan pada penelitian kualitatif dan analisis isi. Semua data diperoleh dari sumber pustaka, dokumen resmi, buku, jurnal dan koran. Temuan telah mengintegrasikan konsep kesejahteraan spiritual manusia ke dalam model pembangunan sosial untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, model yang diusulkan adalah model alternatif dengan menggabungkan beberapa elemen positif dari paradigma Barat dan aspek spiritual terutama dari perspektif Islam. Model yang diusulkan ini dikembangkan berdasarkan pada kreativitas dalam pembentukan kebijakan sosial yang komprehensif.

## **ABSTRACT**

This article is a model of social development for poverty alleviation based on spirituality. Social development requires thinking that is consistent between the conception and the practice. Social development activities is a business that is relentless, as long as there is still the problem of human life and require completion. Focus on building human with the goal of allowing people to enjoy life in a creative, healthy and prosperous. It is expected become constructive model for the government's poverty alleviation. This article is based on qualitative research and content analysis. All data were obtained from literature sources, official documents, books, journals and newspapers. The findings have been integrating the concept of man's spiritual well-being into a social development model for poverty alleviation in Indonesia. In particular, the proposed model is an alternative model to incorporate some of the positive elements of the western paradigm and spiritual aspects, especially from the perspective of Islam. The proposed model was developed based on the creativity in the establishment of a comprehensive social policy.

Keywords : social development, community development, poverty, spiritual

## PENDAHULUAN

Pembangunan sosial hakekatnya merupakan upaya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Globalisasi merupakan pendorong perubahan sosial yang tidak hanya membawa kemajuan tetapi juga menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Karena itu, globalisasi pun turut menyebabkan kemiskinan, pembodohan di bidang pendidikan, hancurnya moralitas masyarakat, tumbuhnya benih-benih konflik baru, dan semakin turunnya ikatan solidaritas sosial. Artinya, isu global bukan hanya dilihat dari pencapaian dan kemajuan pembangunan, namun perlu juga disikapi dan ditelaah secara kritis, sehingga diperlukan suatu gerakan intelektual dalam rangka memberikan pandangan yang jernih dan solusi kritis terhadap pembangunan. Pada masa akan datang kita dituntut mengembangkan cara yang berbeda dengan konsep dan pendekatan pembangunan yang secara *struktural* bertumpu pada daya dukung komunitas lokal (*kultural*), dengan harapan dapat memperlihatkan manfaat bagi keserasian dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan sosial meletakkan "*manusia sebagai pusat perhatian pembangunan dan kerjasama internasional*" untuk memenuhi kebutuhan sosial sebagai bagian integral untuk stabilitas nasional dan Internasional (Midgley 1994; Macarov 1995). Pembangunan sosial berasas prinsip kerjasama antar pemerintah, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran, tanggungjawab serta kemampuan setiap orang ikut serta dalam pembangunan.

Pendekatan pembangunan sosial berusaha menggabungkan dimensi saintifik maupun kemanusiaan yang berorientasi praktis dalam pembangunan. Upaya membangun suatu model pendekatan, perlu azas pemikiran serta strategi pembangunan berkelanjutan, dikenal "*komitmen dan strategi global*". Artikel ini merupakan hasil kajian evaluasi untuk mengembangkan sebuah model pengentasan kemiskinan berazaskan realitas sosial. Data diperoleh dari sumber pustaka; dokumen resmi, buku, jurnal dan koran. Metode kajian ini adalah deskriptif-evaluatif yang didasarkan pada penelitian kualitatif dan analisis isi. Kegiatan ini berfungsi untuk membentuk "kerjasama baru" yang mengamalkan satu pandangan bersama mengenai paradigma dan etika sosial baru. Semua kegiatan ini berkaitan dengan tanggungjawab (moral, sosial, politik, dan ekonomi) untuk mengentaskan kemiskinan.

## **SOSIOLOGI PEMBANGUNAN: AZAS PEMBANGUNAN SOSIAL**

Sosiologi Pembangunan terus berkembang, baik pada tatanan filosofis, teoritis dan pendekatan dalam bentuk pelbagai model aplikasi praktis untuk pembangunan. Berazaskan pemikiran sosiologi pembangunan, model pendekatan dan strategi pembangunan sosial tidak dapat dilaksanakan tanpa menggabungkan dan menerima sumbangan dari disiplin lain secara kreatif dan dinamik. Oleh karena itu, pendekatan dan strategi pembangunan sosial, secara konsepsional dan komprehensif, perlu dilihat dari: ada situasi sosial yang menunjukkan pembangunan sosial menginginkan perubahan; ada proses pembangunan sosial; pembangunan sosial ditujukan untuk mencapai tujuan (Midgley 1995; Spicker 1995). Pembangunan sosial perlu pendekatan baru karena semakin luas dan kompleksnya lingkup bidang ini dalam pembangunan. Karena itu, pendekatan, strategi dan pencapaian pembangunan sosial berusaha membangun sintesis baru untuk mencapai tujuan pembangunan manusia.

Pembangunan sosial memiliki tujuan untuk keadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Deacon (2006) berpendapat altruisme dapat berkontribusi untuk keadilan sosial dan kesejahteraan sosial dengan mengurangi kesenjangan sosial. DuBois dan Miley (2005) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai ketentuan-ketentuan sosial dan proses secara langsung berkaitan dengan pencegahan dan pengobatan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup. Kedua definisi menggambarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah lembaga atau bidang kegiatan yang melibatkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat. Pemerintah bertindak sebagai agen penegak, membuat arah (*direction*) dan pemantauan (Abubakar Ah, Zakaria, dan Nurdin 2012).

Dalam konteks pembangunan manusia, agenda pembangunan menjadi elemen inti di arena kemiskinan masif. Deacon (2000), Esping-Andersen (1996) dan Mishra (1999) telah mengusulkan pentingnya keterlibatan ilmuwan sosial sebagai analis dan perancang kebijakan sosial internasional. Para ilmuwan dan aktivis sosial berperan penting dalam melawan globalisasi yang mempengaruhi pembangunan (di) Indonesia yang dicengkeram oleh pasar global. Sektor publik yang sebelumnya di urus negara, diserahkan kepada mekanisme pasar, termasuk sektor makanan, minyak dan gas, listrik dan pendidikan.



Dalam banyak kasus negara berkembang, globalisasi melemahkan peran negara dan sering menjadi pemicu disintegrasi sosial dan munculnya masalah sosial "lokal", terutama kemiskinan (Weiss 2000; Kostovicova dan Bojicic-Dzelilovic 2009).

Inti dari upaya membangun model pendekatan pembangunan sosial adalah menggunakan evaluasi sebagai sebuah konsep yang diartikan sebagai kajian sistematis yang dirancang dan dilaksanakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Secara khusus, evaluasi perlu untuk memperbaiki *kuualitas* dengan meregulasi semua aspek kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, evaluasi semakin lebih mementingkan keterbukaan sebagai cara berfikir skeptis (teknis rasional) dalam organisasi yang mempunyai tujuan dan *nilai-nilai* (bukan hanya mementingkan '*produktif hasil kerja*'). Pendekatan evaluasi telah menjadi satu *strategi pelaksanaan* dengan menempatkan manusia sebagai sumber daya, dan mengutamakan pelayanan kemanusiaan secara efisien. Pendekatan evaluasi yang bersifat *teknis rasional*, dapat digabungkan dengan *pendekatan interpretatif* telah melahirkan pendekatan yang lebih kritis. Pendekatan evaluasi yang baru ini dianggap lebih baik karena memudahkan mempunyai keterbukaan 'debat' mengenai nilai praktis, baik dalam kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan (Posavac & Carey 1985; Everitt & Hardiker 1996).

## **PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

### **1. Kemiskinan dan Isu HAM**

Kemiskinan digambarkan sebagai berpenghasilan rendah, dianggap merendahkan martabat, dan mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia. Kemiskinan merupakan penyebab dan konsekuensi dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti penggusuran paksa dari rumah atau tanah, penghancuran atau penolakan akses ke sistem sumber, disimpulkan: "kemiskinan merupakan pelanggaran hak asasi manusia." Orang-orang miskin umumnya melihat kemiskinan melalui manifestasi yang berbeda dari kekurangan: "*kelaparan, kekurangan gizi, buta huruf, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan, diskriminasi sosial, ketidakamanan fisik dan pengucilan sosial dan politik*". Mereka juga menyadari kurangnya suara dan kekuatan yang membuat mereka terbuka untuk dieksploitasi. Pada dasarnya, mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim tidak diperlakukan sebagai manusia layak hak asasi manusia, di-diskriminasi, sering dieksploitasi, terpinggirkan dan stigma, dan menolak akses ke hak dan sumber daya atas dasar kemiskinan mereka. Dalam pandangan ini, tidak dapat diterima untuk membiarkan setiap manusia hidup dalam kondisi kekurangan yang

merendahkan, seperti tanpa kesejahteraan fisik maupun martabat kemanusiaan mereka (Pogge 2008; Donald dan Mottershaw 2009).

Apakah kemiskinan melanggar hak asasi manusia?, tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan 'hak asasi manusia' dan 'kemiskinan'; maka hubungan dengan kemiskinan akan dibingkai dalam cara yang sangat berbeda dibandingkan jika hak asasi manusia dipahami mencakup berbagai hak, termasuk hak-hak ekonomi dan sosial. Banyak yang berpendapat bahwa semua orang yang hidup dalam kemiskinan - menderita pelanggaran hak asasi manusia. Sementara kemiskinan dalam konteks Indonesia, konsep ini diperlukan untuk menjelaskan lebih berkaitan dengan budaya lokal dan perbedaan sosio-ekonomi. Dercon dan Shapiro (2007) menyatakan, dampak dari risiko dan guncangan pada mobilitas kemiskinan, analisis dinamika kemiskinan memberikan intuisi menjadi efek dari kebijakan sosial-ekonomi dan anti-kemiskinan dan membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi kebijakan yang efektif membantu rumah tangga untuk menjauh dari kemiskinan.

## **2. Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan**

Kebijakan sangat penting untuk pencapaian pembangunan sosial. Kohler dan Keane (2006) menyebutkan bahwa kebijakan sosial dianggap transformatif, karena tujuannya untuk memungkinkan semua orang sama-sama mengakses hak dan mempertahankan kualitas hidup layak, dan menyadari potensi penuh diri mereka. Ini adalah akar penyebab dan multi-dimensionalitas kemiskinan, ketimpangan, dan pengucilan sosial. kebijakan sosial transformatif didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, kesetaraan dan non-diskriminasi, saling ketergantungan dan keterkaitan, akuntabilitas dan supremasi hukum, partisipasi dan inklusi yang saling tidak terpisahkan (Sunusi 2012).

Program pembangunan sosial Indonesia telah mengubah kebijakan pengentasan kemiskinan dari pendekatan top-down makro dalam rumah tangga ke pendekatan partisipatif (Villanger dan Enes 2004). Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengurangi kemiskinan kronis, meliputi subsidi pendidikan (Bantuan Operasional Sekolah), beasiswa, bantuan tunai bersyarat, program pemberdayaan masyarakat (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), kredit untuk usaha kecil-menengah (*microfinance*) dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur (Program pengembangan Kecamatan). Selain itu, Pemerintah melindungi orang miskin dari beberapa guncangan eksternal melalui

penyaluran beras bersubsidi (RASKIN), transfer tunai (Bantuan Langsung Tunai) dan asuransi kesehatan yang ditargetkan untuk masyarakat miskin (Askeskin). Diberikan juga subsidi Langsung Tunai atau BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Program Keluarga Harapan atau PKH (Program Keluarga Harapan) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (Sistem Jaminan Sosial Nasional / SJSN) (Suharto 2009). Rumah sakit umum menyediakan pengobatan gratis bagi keluarga miskin melalui Asuransi Kesehatan Masyarakat atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan pemerintah daerah menyediakan Asuransi Kesehatan Masyarakat atau Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Untungnya, beberapa rumah sakit umum membuat lebih mudah selama aplikasi disahkan oleh Kementerian Sosial, mereka akan mendapatkan layanan gratis. Bersamaan dengan itu, untuk mempercepat pembangunan desa, pemerintah juga meluncurkan program PNPM Mandiri Perdesaan. Demikian pula, untuk keluarga miskin perkotaan, pemerintah telah meluncurkan PNPM Mandiri Perkotaan (Paket Informasi PNPM Mandiri 2012 - 2013).

Setelah reformasi tahun 1998, pemerintah memperhatikan lebih serius masalah kemiskinan. Dalam konteks masyarakat miskin, masih banyak yang tetap miskin dan terpinggirkan, terutama di bagian timur Indonesia seperti Provinsi Papua. Namun, itu tidak berarti bahwa Pemerintah tidak mengambil tindakan apapun tentang daerah ini. Bahkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 atau UU Pemerintah tentang Otonomi Khusus Papua diikuti oleh Perpu 1/2008 setelah pembentukan Provinsi Papua Barat yang dibagi dari Provinsi Papua, pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian besar terhadap perkembangan progresif di daerah-daerah. Setidaknya, Pemerintah dan pemerintah daerah telah menghabiskan miliaran Rupiah untuk memajukan program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan. Korupsi adalah masalah utama Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berjuang untuk melawan korupsi. Meskipun ada beberapa program pengentasan kemiskinan, terdapat kelemahan dalam implementasi kebijakan, Pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya dengan membuat kerjasama yang sukses. Beberapa kemajuan relatif lambat, disebabkan oleh korupsi yang kronis, kolusi dan nepotisme (KKN) dan isu-isu belum terselesaikan dari ketimpangan antara kaya dan miskin (Suharto 2009). Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan strategis untuk menangani kemiskinan termasuk provinsi Papua dan Papua Barat di atas. Dalam hal ini, disarankan agar pemerintah Indonesia harus menciptakan cara-cara yang efektif dan efisien.

## **PEMBANGUNAN SPIRITUAL**

### **1. Konsep Spiritualitas dalam Pembangunan**

Spiritualitas merupakan salah satu aspek penting dalam konsep dan pendekatan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan. Beberapa ahli telah melakukan penelitian tentang peran spiritualitas dalam pembangunan. Di Amerika Serikat, Holloway (2007) menemukan bahwa hingga 80 persen dari orang-orang berpikir bahwa ide yang baik agar dokter berbicara dengan pasien tentang keyakinan spiritual, hanya 10 persen atau kurang mengatakan bahwa dokter mereka telah melakukannya. Selain itu, banyak kalangan praktisi medis menganggap kesejahteraan spiritual menjadi komponen kesehatan yang penting. Tren yang sama juga terdapat di Australia dan Inggris.

Di Indonesia, konsep spiritualitas diartikulasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah prihatin dengan perkembangan baik material dan aspek spiritual. Visi Kementerian ini menyatakan, "Pembangunan yang komprehensif bagi masyarakat melingkupi aspek solidaritas spiritual, budaya, dan sosial, yang tercermin dalam hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan, antar manusia, dan antara manusia dan alam lingkungan Hidup (BAPPENAS, 2015). Menempatkan spiritualitas dalam program pembangunan bisa menyeimbangkan dari kondisi yang lebih menekankan pada pembangunan fisik. Dalam konteks pembangunan Indonesia - inovasi saja tidak cukup. Inovasi harus dilengkapi spiritualitas sehingga konsisten dengan garis moral. Harus diakui bahwa Indonesia memiliki banyak warga berpengetahuan dan terampil, namun kurang berhasil. Hal ini adalah masalah besar dalam pembangunan Indonesia. Sejak kebijakan desentralisasi dilaksanakan, administrasi publik menghadapi masalah serius, manajemen pelayanan terutama pemerintah masih korup. Ini adalah tugas berat untuk pemerintahan di daerah. Namun demikian, masih ada optimisme dengan menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam administrasi publik, kinerja pemerintah lokal akan meningkatkan kinerja dan keberhasilan pembangunan.

Dalam perspektif Islam untuk pembangunan, menurut Barise (2004), pandangan dunia yang koheren didasarkan pada tauhid sesuai panduan umat Islam. Terdapat 5 pilar yang membantu Muslim untuk mengembangkan eksistensi kehidupan yang baik dan bermoral: Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji (Abdalati 1986; Haneef 1999). Rukun iman dalam agama Islam dan prakteknya memiliki implikasi penting bagi pekerjaan seorang Muslim

(Al-Krenawi dan Graham 2000). Selanjutnya, dalam konteks Islam, filsafat kesejahteraan mengacu Al-Quran disebutkan dalam berdoa: "Ya..Allah berkatilah kami dengan kebaikan (hasanah), baik di dunia maupun di akhirat." Hasanah dapat diartikan; kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dalam agama Kristen, istilah kebaikan ini disebut sebagai kesejahteraan berdasarkan cinta, sedangkan agama Hindu; kesejahteraan itu dengan moral dan kebaikan.

## 2. Urgensi Pembangunan Spiritual

Saad dan Hatta (2012) berpendapat, kesejahteraan dapat diamati dari kualitas hidup, kepuasan sosial, kesejahteraan masyarakat dan standar hidup; yang melibatkan keluarga, kelompok, organisasi, persaudaraan, komunitas dan masyarakat sipil. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki parameter sendiri seperti nutrisi, perlindungan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, keamanan, stabilitas sosial, lingkungan fisik dan kelebihan pendapatan. Kesejahteraan spiritual bisa digambarkan sebagai urusan keagamaan, kesehatan, pendidikan, pendapatan, bertobat, mendapat rahmat ketika menghadapi kematian, dan diampuni di akhirat. Tiga indikator yang terakhir, yaitu bertobat, mendapat rahmat ketika menghadapi kematian, dan diampuni setelah meninggal tidak diperhitungkan oleh para sarjana. Namun, diyakini bahwa manusia membutuhkan kesejahteraan dan spiritualitas untuk kehidupan di dunia dan akhirat.

Pemahaman di atas menunjukkan ada kesenjangan antara konsep modern dengan keagamaan, khususnya kesejahteraan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan didefinisikan oleh para ulama berbeda mana yang benar dan dapat diterima. Disadari bahwa ada "*missing link*" karena mengabaikan pendekatan spiritual yang sangat penting bagi manusia. Hal ini dirasakan bahwa pemahaman kesejahteraan yang modern cenderung dilihat dari orientasi fisik-material. Hal ini diyakini bahwa ini adalah masalah definisi modern tentang kesejahteraan sehingga harus direvisi. Dalam konteks ini definisi kesejahteraan yang modern tetap bermasalah, karena melihat kesejahteraan hanya berdasarkan pada aspek material dan tidak menganggap pendekatan spiritual sebagai bagian penting dari kesejahteraan. Dalam konteks Indonesia, menempatkan konsep ini berdasarkan sila pertama "Pancasila" yaitu: "Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mendukung dan penguatan pandangan ini, Zaid dan Barise (2004) menyatakan bahwa Islam dianggap sebagai cara hidup yang lengkap; spiritualitas dalam Islam adalah unik komprehensif. Indikator kesejahteraan spiritual dalam perspektif Islam didasarkan pada

makna kesejahteraan dan kebahagiaan manusia (hasanah) di dunia dan akhirat (akhirat); termasuk kebebasan beragama dan keamanan, fisik, pendidikan yang kesehatan, ekonomi dan pendapatan yang berkah, tobat sebelum meninggal, mendapatkan rahmat ketika meninggal dunia, dan maghfirah setelah kematian. Berkait dengan hal ini, Profesor Daoed Joesoef, mantan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Indonesia menyatakan, dalam membentuk negara bangsa yang kuat, pertama yang harus dilakukan adalah membangunkan jiwa rakyat. Dalam lagu "Indonesia Raya", telah memperingatkan: ada kebutuhan untuk membangun jiwa (lebih dulu), baru kemudian tubuhnya (Kompas, 20 Mei 2015), dan tugas utama pemerintah dalam pembangunan adalah "bangunlah jiwa". (Moral dan Pembangunan jiwa, Kompas, 12 Juni 2015).

### **3. Model Pembangunan Sosial: Mengutamakan Spiritual**

Perkembangan konteks spiritualitas sangat penting untuk menghindari perbedaan transformasi dari nilai-nilai moral. Hal ini jelas menunjukkan bahwa spiritualitas berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Menempatkan spiritualitas dalam program pembangunan bisa memenuhi definisi konvensional yang lebih menekankan pada pembangunan fisik. Bagaimanapun, spritualitas ini adalah dasar yang baik untuk pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan Indonesia - inovasi saja tidak cukup; inovasi harus ditambahkan dengan spiritualitas sehingga lebih konsistendengan nilai-nilai moral dan harapan masa depan bangsa dan negara. Sesuai dengan skenario untuk mengentas kemiskinan, ada yang dibutuhkan untuk pembangunan sosial yang komprehensif dengan menggabungkan aspek spiritual dan material. Islam memberikan pedoman pada pemenuhan kebutuhan spiritual, fisik, kognitif, psikologis dan sosial (Barise, 2004). Karena itu, model pembangunan sosial, dikonstruksi berazas pada spiritual dan fisik, sosial dan Ekonomi (Nurdin 2015).

Secara historis, ide pembangunan sosial untuk pengembangan masyarakat berasal dari para akademisi Barat dan sebagai bagian dari para admnistrator kolonial sebelum Indonesia merdeka. Kita bisa melihat adanya tumpang tindih ide, termasuk partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat dan komunitas kerja. Dalam konteks ini, pengembangan masyarakat adalah cara terbaik untuk suatu pendekatan; dengan mencampurkan pendidikan informal, tindakan kolektif dan pengembangan organisasi; dengan fokus pada keadilan sosial, saling membantu, jaringan lokal dan koherensi komunal. Berdasarkan pengalaman, orang adalah

subjek dan objek dari proses pembangunan masyarakat mereka sendiri, dan mampu memiliki tanggung jawab untuk itu. Dalam model pembangunan sosial untuk pengembangan masyarakat, mengacu pada pendekatan atau intervensi dari instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah dengan prinsip-prinsip dasar meskipun bervariasi tergantung pada situasi. Fokus model pengembangan masyarakat-mendesak, bagaimana inisiatif masyarakat membangun dari dana sendiri, dukungan anggota masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah. Kerjasama adalah konsep strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua elemen ini menentukan pencapaian pembangunan yang didasarkan pada aspirasi masyarakat (Nurdin 2015).

Pada dasarnya, model ini dikembangkan berdasarkan argumen utama yaitu spiritualisasi kesejahteraan manusia. Upaya pengembangan model ini diperlukan untuk mengintegrasikan konsep spiritual kesejahteraan manusia dan model konvensional yang didominasi oleh Pakar Barat. Hal ini tidak berarti bahwa model konvensional diabaikan dan tidak berguna. Model ini menawarkan model yang komprehensif dengan menggabungkan beberapa elemen positif dari paradigma Barat dan aspek spiritual terutama dari perspektif Islam. Argumen utama adalah model mengusulkan perspektif tertentu untuk memahami kesejahteraan manusia. Secara khusus, model sangat percaya bahwa kehidupan setelah meninggal merupakan bagian dari komponen kesejahteraan manusia. Dan penulis menganggap bahwa kesejahteraan manusia adalah "pembangunan total" yang berarti bahwa manusia dapat mencapai kebahagiaan mereka jika mereka dapat mencapai keduanya, kehidupan di dunia dan akhirat.

## **SIMPULAN**

Proses globalisasi sangat mempengaruhi pembangunan di Indonesia. Makna dan pendekatan pembangunan memiliki implikasi praktis yang penting untuk pengentasan kemiskinan. Dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah berinovasi dan menerapkan kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan. Meskipun, semua program dari banyak Kementerian yang pro-poor, namun itu lebih baik untuk memberikan mandat untuk tubuh kemiskinan khusus. Situasi saat ini berbeda dimana banyak program yang dijalankan oleh banyak badan-badan pemerintah, tidak efektif dan tentu saja sangat berisiko untuk dimanipulasi. Korupsi adalah diantara faktor menyebabkan kegagalan pengentasan kemiskinan, karena itu dikembangkan satu model pembangunan sosial dengan mengutamakan azas spiritualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, H. 1986. *Islam in focus*. Jeddah, Saudi Arabia: WAMY.
- Al-Krenawi, A. and J. Graham. 2000. "Islamic theology and prayer". *International Social Work* 43: 289-304.
- Barise, A. 2004. "Islamic perspectives in social work: Towards a practice model". Paper presented at the 32nd Biennial Conference of the International Association of Schools of Social Work, Adelaide, Australia, October 2-5, 2004.
- BAPPENAS. 2015. Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan. [http://www.bappenas.go.id/index.php/download\\_file/view/8711/1729/](http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/8711/1729/) (accessed June 11, 2015)
- Deacon, Bob. 2000. *Globalization and Social Policy: The Threat to Equitable Welfare*. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).
- Donald, Alice and Elizabeth Mottershaw. 2009. *Poverty, inequality and human rights: Do human rights make a difference?*. York: Joseph Rowntree Foundation (JRF).
- Du Bois, Brenda and Karla Krogsrud Miley. 2005. *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Pearson.
- Villanger, Espenand Anette Enes. 2004. *The role of participation and empowerment in income and poverty dynamics in Indonesia 1993-2000*. Chr:Michelsen Institute.
- Everitt A. & Hardiker P. 1996. *Evaluating for Good Practice*. London: MacMillan Press.
- Esping-Andersen, Gosta. 1996. "After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy." In Gosta Esping-Andersen, *Welfare States in Transition*, eds. London: Sage Publication (UNRISD).
- Hakim Sarker, A. and Ahmadullah, A.K. 1995. Bangladesh. In T.D. Watts, D. Elliott, and N.S. Mayadas, eds. *International handbook on social work*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Haneef, S. 1999. *What everyone should know about Islam and Muslims*. Delhi: Adam Publishers.
- Holloway, Margaret. 2007. "Spiritual Need and the Core Business of Social Work". *British Journal of Social Work* 37:265-280.
- Kohler, G. & J. Keane. 2006. *Social Policy in South Asia: Towards Universal Coverage and Transformation for Achieving the Millennium Development Goals*. New York: UNICEF.
- \_\_\_\_\_. 2015. "Daed Yoesoef: Membentuk Negara Bangsa". Kompas, 20 Mei
- Kostovicova, Denisa and Vesna Bojicic-Dzelilovic, eds. 2009. *Persistent State Weakness in the Global Age*. Farnham. UK: Ashgate Publishing.



- Macarov, D.1995. *Social Welfare: Structure and Practice*.London:Sage Pub
- Midgley J, 1994, "The Challenge of Social Development: Their Third World and Ours 1993, Daniels S. Sanders Peace and Social Justice Lecture". *Social Development Issues*. Vol. 16 (2).
- Midgley J.1995.*Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*.London:Sage Publication.
- Makmur Sunusi. 2012. Social Policy on Achieving the Millennium Development Goals in Asia Pacific, Paper presented at the International Consortium for Social Development Asia Pacific (ICSD-AP) Conference “Envisioning New Social Development Strategies Beyond Millennium Development Goals”, Ambarukmo Palace Hotel, Yogyakarta, Indonesia, 27-30 June.
- Mamap Ismy. 2012. *Konsep dan Makna Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam*, Available in <http://skripsitesis4u.blogspot.com/2012/07/konsep-dan-makna-kesejahteraan-dalam.html> (accessed 25 February 2014).
- McDonald, Matt. 2002.”Human Security and the Construction of Security.”*Global Society* 16(3): 277-295.
- Mishra, Ramesh. 1999. *Globalization and the Welfare State*. Cheltenham, UK:Edward Edgar Publishing.
- Nurdin, Muhamad Fadhil ed. 2015. *Sociology and Welfare Development*.Yogyakarta:Penerbit Samudra Biru.
- Paket Informasi PNPM Mandiri, 2012 – 2013. 2012. Jakarta: Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri.
- Pogge, Thomas. 2008. *World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms*, 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
- Posavac E.J & Carey R.G. 1985. *Program Evaluation, Methods and Case Studies*:New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Abu Bakar Ah, Siti Hajar, Abd. Hadi Zakaria dan Muhamad Fadhil Nurdin. 2012. Dasar Sosial Transformatif: Rekonstruksi Makna Dan Strategi Kesejahteraan Sosial. Paper presented at the Konvensyen Kebangsaan Kepimpinan Institusi Pengajian Tinggi Dan Kesejahteraan Sosial: Merealisasikan Transformasi Ke Arah Masyarakat Sejahtera, Hotel Hilton, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, -21 Mei 2012.
- Spicker. 1995. *Social Policy: Themes and Approaches*. London: Prentice Hall
- The Chronic Poverty Report. 2008-09. Northampton, UK: The Chronic Poverty Research Centre.
- Townsend, Peter. 2008. “Concepts of poverty and deprivation”.In *Social exclusion- Concepts in Sociology Vol.1*, Byrne David, eds. New York: Routledge.
- Waltz, K.N. 1999.”Globalization and Governance”.*PS: Political Science and Politics*, 32(4):693–700.
- Weiss, Linda. 2000. “Globalization and State Power”. *Development and Society*, 29 (1): 1-15.

- Zaid, H. and A. Barise. 2004. Mafhum Al-Faqr Fil Islam. [The concept of poverty in Islam]. Proceedings of the International Conference on Poverty in the Muslim World and Communities: Causes and solutions: Vol. 2, (pp. 161-180). Kuala Lumpur, Malaysia: IIMU.
- Saad, Zarina Mat dan Zulkarnain A. Hatta.2012.Cabaran kesejahteraan sosial Negara: Perspektif Kerja Sosial. *Prosiding Konvensyen Kebangsaan, Pengukuhan Kepimpinan Institusi Pengajian Tinggi Dalam Tranformasi Kesejahteraan Sosial Negara*, Kuala Lumpur.